



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI**

Gedung BPKP Pusat Lantai 9, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Ext. 0327/, Faksimile 021-85906467

Nomor : LKIN- 8 /D5/01/ 2017 28 April 2017
Lampiran : 2 halaman
Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang
Investigasi Triwulan I Tahun 2017

Yth. Kepala BPKP

di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Investigasi Triwulan I Tahun 2017. Capaian kinerja triwulan I tahun 2017 merupakan perbandingan realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja triwulan I tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

IKU 1 Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita (indeks APKPN, skala 1-5) pada triwulan I belum ditetapkan pencapaiannya.

2. Sasaran Program

a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

- 1) IKU 1.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Keugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) pada sidang di pengadilan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan

dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 12,55% atau mencapai 31,37% dari target tahun 2017 sebesar 40%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan yaitu 157 laporan dibandingkan 1.251 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pemberian keterangan ahli, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE) yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 2) IKU 1.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah tingkat pemanfaatan hasil audit investigative oleh APH. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 7,69% atau mencapai 10,99% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 1 laporan dibandingkan 13 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 3) IKU 1.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam

rangka pemberian rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang dibandingkan dengan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 66,67% atau mencapai 111,12% dari target tahun 2017 sebesar 60%. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 2 laporan dibandingkan 3 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 4) IKU 1.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit penyesuaian harga oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa untuk pengambilan keputusan penyesuaian harga. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan yaitu 8 laporan dibandingkan 8 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit penyesuaian harga yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

- 5) IKU 1.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit klaim oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk pengambilan keputusan penyelesaian klaim. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk pengambilan keputusan klaim

dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan yaitu 11 laporan dibandingkan 11 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit klaim yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

b. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

IKU 2.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan adalah tingkat pemanfaatan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran program/kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah Laporan Hasil EHKP yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah laporan EHKP yang diterbitkan yaitu 6 laporan dibandingkan 6 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

1) IKU 3.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP.

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) adalah tingkat penyelesaian penugasan *Fraud Control Plan* (FCP) termasuk *Fraud Risk Assessment* (FRA) baik atas permintaan K/L/P/K dan inisiatif sendiri pada salah satu dari tahapan:

- a. Sosialisasi
- b. *Diagnostic Assessment*
- c. Bimbingan Teknis Implementasi
- d. Evaluasi
- e. Monitoring

yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP dilaksanakan (Sosialisasi + *Diagnostic Assessment* + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 70% atau mencapai 140% dari target tahun 2017 sebesar 50%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan K/L/P/K yang mengimplementasikan

FCP termasuk FRA dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP yang dilaksanakan yaitu 7 laporan dibandingkan 10 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan FCP termasuk FRA yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 2) IKU 3.2. Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard & soft competency*) di bidang pencegahan.

Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard and soft competence*) di bidang pencegahan, yaitu kompetensi untuk melakukan kegiatan *Fraud Control Plan* (FCP), *Fraud Risk Assesment* (FRA), Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), dan Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK). Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang sudah pernah (berpengalaman) melakukan FCP/FRA/MPAK/PBOAK kepada K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor.

Sampai dengan triwulan I tahun 2017 belum ada realisasi kinerja program ini.

d. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

- IKU 4.1. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat adalah rasio K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi tiga unsur kriteria yaitu:

- a. Mempunyai Daftar Risiko *Fraud* yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KPAK;
- b. Mempunyai rencana penanganan risiko *fraud* yang dibahas bersama dengan anggota KPAK;
- c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing* namun menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*.

dibandingkan dengan KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Sampai dengan triwulan I tahun 2017 belum ada realisasi.

e. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian

IKU 5.1. Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian.

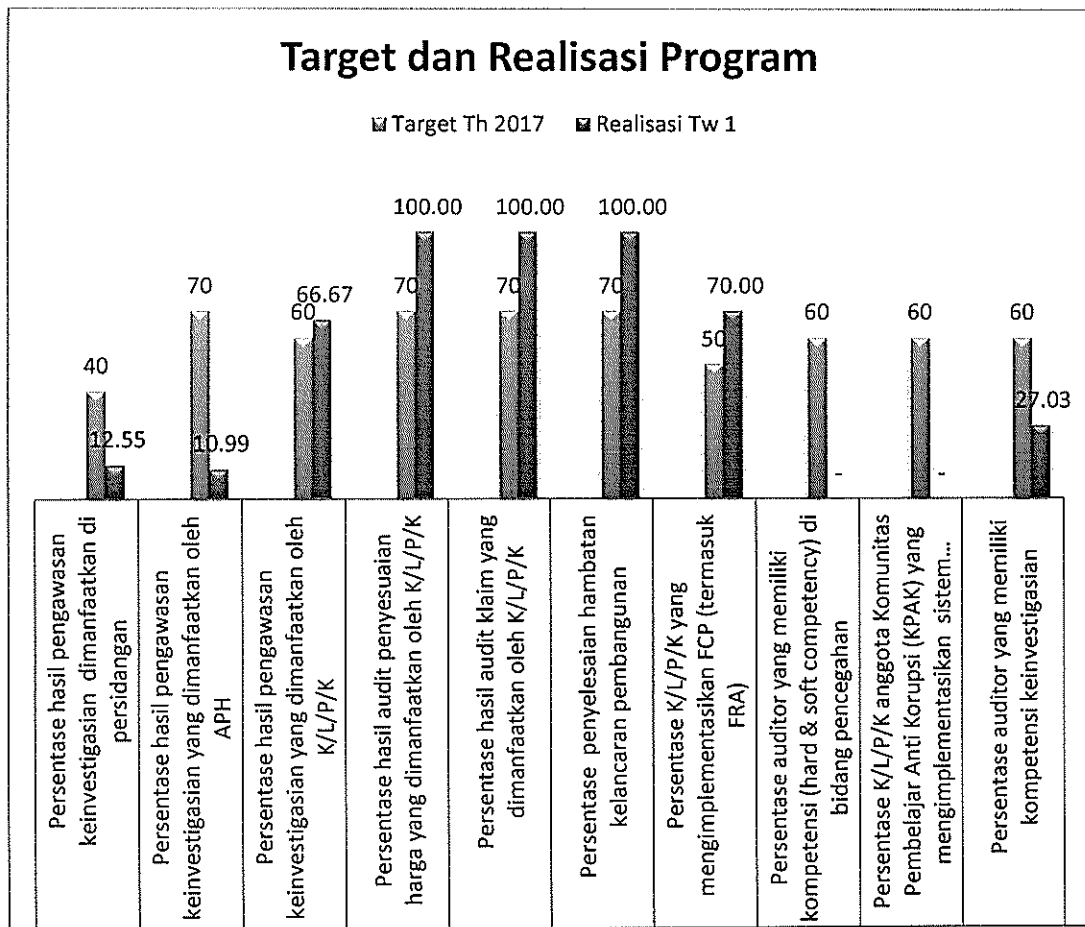
Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor investigatif meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang:

- 1) Hukum
- 2) Keuangan
- 3) Audit dan Akuntansi
- 4) Ekonomi
- 5) Penyelidikan
- 6) Komputer
- 7) Investigasi
- 8) Manajemen

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat pada tahun 2017.

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2017 sebesar 16,22% atau mencapai 27,03% dari target tahun 2017 sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat di atas dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat yaitu 66 auditor dibandingkan 407 auditor.

Target dan realisasi program tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:



B. Permasalahan dan Rencana Tindak

Dari gambar 1 terlihat sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang masih harus ditingkatkan kinerjanya karena belum mencapai target proporsional tahun 2017 sebesar 25% yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan.
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan oleh APH.
3. Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard & soft competency*) di bidang pencegahan.
4. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

Rendahnya capaian pada 4 (empat) indikator kinerja tersebut disebabkan antara lain perkara yang telah dilaporkan pada laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik namun perkara tersebut belum disidangkan dan kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) belum dilaksanakan.

Deputi Bidang Investigasi akan melaksanakan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Semester II Tahun 2017.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran Deputy Bidang Investigasi tahun 2017 sebesar Rp5.525.000.000,00. Pada triwulan I tahun 2017 telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.141.336.199,00 atau mencapai 20,66% dari anggaran sebelum *self blocking*, dengan rincian sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Deputy Bidang Investigasi

Triwulan I Tahun 2017

Pengawasan/ Non Pengawasan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Dana (%)
	Sebelum <i>Self Blocking</i>	Tw I 2017	Sebelum <i>Self Blocking</i>
Pengawasan	4.250.000.000	649.949.761	15,29
Non Pengawasan	1.275.000.000	494.386.438	38,78
Jumlah	5.525.000.000	1.141.336.199	20,66

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Kepala BPKP, kami ucapkan terima kasih.

Deputi,



Iswan Elmi

NIP 19600127 198102 1 001